

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan termasuk aset daerah.
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan sesuai bidang tugasnya;
 b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. Pelaksanaan administrasi Badan;
 e. Pelaksanaan fungsi BUD;
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	1. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah OPD yang laporan keuangannya sesuai SAP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ <p>DO : Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan PD</p>	Laporan Keuangan PD	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
		2. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	$\frac{\text{Jumlah aset tetap terdokumentasi legal}}{\text{Jumlah aset tetap}} \times 100\%$ <p>DO : Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumentasi legal tersebut berupa: 1. Tanah berupa Sertifikat (diterbitkan oleh BPN) 2. Kendaraan Bermotor berupa BPKB (diterbitkan oleh Satlantas Polri) 3. Peralatan Mesin Lainnya berupa Berita Acara Serah terima</p>	1. Laporan Barang Milik Daerah 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Aset
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai SAKIP	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset
		2. Nilai RB	Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur	Hasil PMPRB	Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset
		3. Nilai IPP	Indeks penilaian public merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi	Hasil penilaian IPP	Sekretariat
		4. Nilai SKM	SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif	Hasil penilaian SKM	Sekretariat

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya		
		5. Persentase Penyerapan Anggaran	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Jumlah Anggaran Belanja}} \times 100\%$ <p>DO : Serapan anggaran adalah besaran persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah berupa laporan keuangan yang disebut laporan realisasi anggaran atau LRA.</p>	SIKSDA	Sekretariat, Bidang Anggaran, Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset

PIL.KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CHUSNUL INAYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720317 199602 2 001